



UNIVERSITAS
MERCU BUANA

LAMPIRAN I

JADWAL KEGIATAN – PELAKSANAAN PENYUSUNAN KARYA AKHIR

KEGIATAN	MARET'08	APRIL '08	MEI'08	JUNI'08	JULI'08	AGUST'08
1. PERSIAPAN PENELITIAN						
Penjajakan/Pemilihan & Survey Pendahuluan						
Konsultasi dengan Koordinator Konsentrasi						
Studi Pustaka, Data Pendukung, Hasil Penelitian Terdahulu						
Penyusunan kerangka Berfikir Proposal						
Penyusunan Draft Proposal						
Pengajuan Penyusunan Karya Akhir (& Calon Komisi Pembimbing)						
Konsultasi dengan Komisi Pembimbing 1-2-3 dst						
Perbaikan Proposal 1-2-3- dst						
Persiapan seminar & Pendaftaran Seminar Proposal Penelitian						
2. SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN						
Pelaksanaan Seminar						
Perbaikan Akhir Proposal & Konsultasi						
3. PELAKSANAAN PENELITIAN (Pengumpulan Data)						
Pengumpulan Data di Lapangan (Angket,Wawancara,Observasi)						
Studi Pustaka (lanjutan)						
Penyusunan Data						
Pengolahan Data &						
Konsultasi 1-2 dst						
Pengolahan Data dan Analisis hasil Olah Data						
4. PENYUSUNAN KARYA AKHIR						
Draft 1-2-3 dst						
Konsultasi 1-2-3 dst & Perbaikan draft 1-2-3 dst						
Pengesahan draft Karya Akhir untuk Ujian Sidang						
Persiapan Ujian Sidang dan Pendaftaran Ujian Sidang						
5. UJIAN SIDANG KARYA AKHIR						
Pelaksanaan Ujian						
Perbaikan Akhir Karya Akhir 1-2 & Konsultasi 1-2						
Pengesahan ijin Pengandaan dan Hard Cover						
6. PENGESAHAN DAN PENYERAHAN KARYA AKHIR						



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH X SERANG

LAMPIRAN II
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

- 1 Berapa jumlah satker dalam binaan Saudara?
- 2 Apakah Satuan Kerja di lingkup kerja Saudara sudah melakukan SIMAK-BMN?
- 3 Jika belum, apa alasan belum melakukan SIMAK-BMN
- 4 Seberapa sering rekonsiliasi data dilakukan dengan UAKPA?
- 5 Apa kegunaan rekonsiliasi?
- 6 Apakah SDM di bidang pelaporan keuangan sudah memiliki kompetensi ?
- 7 Apakah prasarana sudah mendukung dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah?
- 8 Apakah pelatihan di bidang SAI masih diperlukan?
bila ya, alasannya apa?
jika tidak, alasannya apa?
- 9 Apa saja kendala dalam melakukan rekonsiliasi data baik secara intern maupun ekstern ?
- 10 Apa peran kanwil dalam pembuatan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat?
- 11 Apakah aplikasi SAKPA sangat membantu dalam penyusunan pertanggungjawaban keuangan negara?
- 12 Apakah faktor jarak sering menyulitkan UAPPA-W untuk melakukan rekonsiliasi dengan UAKPA?
- 13 Apakah Kanwil sebaiknya menerapkan sanksi kepada UAPPA-W yang tidak/ terlambat melakukan rekonsiliasi?
- 14 Bagaimana tanggapan Saudara tentang system aplikasi?
- 15 Apa kegunaan Laporan Keuangan Pemerintah yang Saudara susun ?

LAMPIRAN III

LKPP Tingkat kanwil X DJPB Serang dinilai masih belum memenuhi standar baik dari tingkat akurasi data maupun kualitas LKPP tersebut

Kenapa data menjadi penyebab yang mempengaruhi tingkat akurasi dan kualitas LKPP yang disusun oleh Kanwil?	
I. Karena data yang masuk di aplikasi Aklap sangat tergantung dari data satker dan KPPN. Kenapa?	Karena faktor manusia
Karena kesalahan dokumen (kecil kemungkinan)	Karena faktor manusia
	Karena malas (sudah tabiat)
	Karena tidak memahami pekerjaan Kenapa?
	1. Karena tidak menguasai pekerjaan. 2. Karena tidak teliti. 3. Karena sering bergantinya petugas baik di satker maupun di KPPN.

LKPP Tingkat kanwil X DJPB Serang dinilai masih belum memenuhi standar baik dari tingkat akurasi data maupun kualitas LKPP tersebut

Kenapa data menjadi penyebab yang mempengaruhi tingkat akurasi dan kualitas LKPP yang disusun oleh Kanwil?



II. Karena rekonsiliasi pendapatan (pajak dan PNB), estimasi pendapatan dan pengembalian belanja masih sering ditemui antara data SAU dengan SAI

Kenapa?		Kenapa?		Kenapa?	
↓	↓	↓	↓	↓	↓
Karena petugas rekonsiliasi di KPPN hanya melakukan rekonsiliasi pagu belanja, realisasi belanja dan uang persediaan	Karena pembukuan pendapatan kurang mendapat perhatian dari satker baik dari segi akun, ketepatan pembebanan anggaran dan rekonsiliasi dengan KPPN	Karena tidak jelasnya setoran-setoran baik pajak maupun PNB yang dilakukan oleh masyarakat di bank/kantor pos sehingga ada transaksi yang tidak jelas akun dan satker yang menerima	Karena ketidakpahaman masyarakat	Karena ketidakpahaman petugas lapangan di satker yang berkaitan langsung dalam pelayanan masyarakat	Karena ketidakpahaman pegawai bank/kantor pos yang melayani setoran kas negara
Kenapa?	Kenapa?	Kenapa?	Kenapa?	Kenapa?	Kenapa?
1. Kurangnya	1. Menganggap yang perlu direkonsiliasi	1. Kurangnya	1. Kurangnya	1. Kurangnya	1. Kurangnya

<p>sosialisasi</p> <p>2. Menganggap rekonsiliasi pendapatan tidak penting</p>		<p>hanya paku dan realisasi belanja.</p> <p>2. Karena sebagai pendapatan yang masuk ke kas Negara, menganggap tidak perlu memperhatikan akun yang sesuai dengan jenis pendapatan tersebut.</p> <p>3. Salah dalam pembebanan akun</p>	<p>sosialisasi dari satker dan Depkeu</p> <p>2. Kurangnya koordinasi antara DJPB, DJP, bank/kantor pos dan instansi/satker penerima PNB</p>	<p>sosialisasi</p> <p>2. Petugas lapangan yang tidak mau tahu/tidak peduli</p>	<p>sosialisasi</p> <p>2. Pegawai bank./kantor pos tidak peduli/tidak mau tahu</p> <p>3. Kurangnya koordinasi antara DJPB, DJP, bank/kantor pos dan instansi/satker penerima PNB</p>
---	--	--	---	--	---



LKPP Tingkat kanwil X DJPB Serang dinilai masih belum memenuhi standar baik dari tingkat akurasi data maupun kualitas LKPP tersebut


Kenapa data menjadi penyebab yang mempengaruhi tingkat akurasi dan kualitas LKPP yang disusun oleh Kanwil?



III. Karena rekonsiliasi data dengan UAPPA-W terutama UAPPA-W DK/TP, masih tersendat

<p>Karena belum adanya koordinasi yang baik antara Bidang Aklap dengan satker/pemda terkait</p>	<p>Karena belum terbentuknya Unit Akuntansi Wilayah di beberapa Pemda</p>	<p>Karena kurangnya dukungan dari pejabat pemda yang bersangkutan</p>
<p>Kenapa?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pendekatan dari Bidang Aklap terhadap satker/pemda yang bersangkutan. 2. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan Bidang Aklap. 3. Keterbatasan dana sehingga tidak bisa melakukan pembinaan secara intensif. 	<p>Kenapa?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang mendapat tanggapan dari pejabat pemda terkait. 2. Tidak adanya koordinasi antara Badan Keuangan Daerah (BKD) dengan dinas-dinas yang menerima dana dari pemerintah pusat. 3. Menganggap bukan tugas utama mereka dan merasa tidak ada urusan dengan dana dari pusat. 4. Dinas-dinas yang menerima dana dari pusat enggan melaporkan ke BKD-nya. <ol style="list-style-type: none"> a. Karena tidak peduli. b. Kurangnya sosialisasi. c. Adanya kepentingan dari dinas setempat untuk mendapatkan dana dari pemerintah pusat dan daerah untuk kegiatan yang sama. 	<p>Kenapa?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Karena tidak paham akan fungsi laporan keuangan. 2. Karena menganggap sebagai pekerjaan yang tidak menarik dan tidak ada uangnya. 3. Karena tidak adanya 'tekanan' dari pimpinan tingkat atas.

LKPP Tingkat kanwil X DJPB Serang dinilai masih belum memenuhi standar baik dari tingkat akurasi data maupun kualitas LKPP tersebut

	
Kenapa data menjadi penyebab yang mempengaruhi tingkat akurasi dan kualitas LKPP yang disusun oleh Kanwil?	
V. Karena masih belum diperbaikinya kesalahan data yang terdapat di KPPN sampai rekonsiliasi berikutnya	
Karena KPPN tidak segera melakukan perbaikan data	Karena kesulitan melakukan perbaikan data, terutama menyangkut setoran setoran pendapatan (pajak/PNBP) yang tidak jelas 'asal-usulnya'
↓	↓
Kenapa?	Kenapa?
1. Karena aplikasi Vera tidak bisa melakukan perbaikan data, sedangkan kesalahan data hanya bisa diperbaiki pada server atau di aplikasi bendum. 2. Karena kesibukan di KPPN terutama menjelang akhir tahun anggaran. 3. Karena kurangnya koordinasi antara seksi Vera dengan Seksi Perbendaharaan, Seksi Persepsi dan Seksi bank Tunggal. <ul style="list-style-type: none"> a. disebabkan masing-masing merasa bukan tugasnya dan hanya menambah pekerjaan saja. 	1. Kurangnya tenaga untuk melakukan perbaikan data. 2. Karena sumber dokumen yang tidak bisa dilacak.

LKPP Tingkat kanwil X DJPB Serang dinilai masih belum memenuhi standar baik dari tingkat akurasi data maupun kualitas LKPP tersebut

Kenapa data menjadi penyebab yang mempengaruhi tingkat akurasi dan kualitas LKPP yang disusun oleh Kanwil?



VI. Karena belum terkoordinasinya aplikasi SIMAK-BMN dengan aplikasi SAKPA sehingga laporan neraca belum menunjukkan data yang sebenarnya.

Kenapa?		Kenapa?	Kenapa?	Kenapa?
<p>Karena belum semua satker menerapkan SABMN apalagi dengan aplikasi terbaru yaitu SIMAK-BMN sehingga laporan barang masih banyak dilakukan secara manual</p>				
Karena adanya kesulitan untuk menentukan saldo awal pada neraca	Karena keengganan satker untuk melaporkan data assetnya	Karena belum berjalannya rekonsiliasi barang pada setiap tingkatan/jenjang	Karena belum adanya pembinaan lebih intensif dari DJKN	Karena belum adanya sosialisasi tentang aplikasi SIMAK-BMN
Karena banyak asset yang sudah tidak sesuai dengan laporan yang dibuat	Karena keengganan satker untuk melaporkan data assetnya	Belum terbentuknya Unit Barang Wilayah serta yang lebih tinggi tingkatannya I	Belum adanya pembinaan lebih intensif dari DJKN	Karena belum adanya sosialisasi tentang aplikasi SIMAK-BMN yang
		Belum terbentuknya Unit Barang Wilayah serta yang lebih tinggi tingkatannya I □ amper semua satker Kementerian/Lembaga	Belum adanya pembinaan lebih intensif dari DJKN	Karena belum adanya sosialisasi tentang aplikasi SIMAK-BMN yang
			1. Kurangnya koordinasi antara DJPB dengan DJKN. 2. Kebingungan untuk menentukan siapa yang berkewajiban melakukan sosialisasi karena aplikasi SIMAK-BMN yang	1. Karena belum terbentuknya unit yang lebih tinggi pada Unit barang di semua satker. 2. Karena belum adanya sosialisasi yang lebih intensif terhadap Unit barang. 3. Karena belum berjalannya rekonsiliasi antara DJPB dengan DJKN

Kenapa?	Kenapa?	Kenapa?	Kenapa?	membuat DJPB Sedangkan tanggung jawab penanganan asset oleh DJKN
<p>1. Banyak asset yang hilang/pin dah tangan.</p> <p>2. Kesulitan untuk menentukan tahun awal penentuan asset, terutama pada satker besar.</p>	<p>1. Takut ketahuan jika ada asset Negara (terutama untuk kendaraan) telah berpindah tangan.</p> <p>2. Belum tertibnya pembuku an</p>	<p>1. Banyak asset yang hilang/pin dah tangan.</p> <p>2. Kesulitan untuk menentukan tahun awal penentuan asset, terutama pada satker besar</p>	<p>1. Kurangnya pegawai di DJKN, karena DJKN adalah unit baru di Depkeu yang khusus menangani masalah asset.</p> <p>2. Kurangnya pegawai yang memiliki kompetensi terutama di bidang inventarisasi dan penilaian asset.</p>	

LKPP Tingkat kanwil X DJPB Serang dinilai belum memenuhi standar baik dari tingkat akurasi data maupun kualitas LKPP tersebut

Kenapa faktor manusia menjadi penyebab yang mempengaruhi tingkat akurasi dan kualitas LKPP yang disusun oleh Kanwil?



<p>Kurangnya SDM yang kompeten di bidang akuntansi dan IT</p>	<p>Sering bergantinya petugas yang menangani laporan keuangan baik di satker maupun di DJPB</p>	<p>Terbatasnya SDM yang ada di satker tertentu sehingga tidak mempunyai petugas yang secara khusus menangani laporan keuangan.</p>	<p>Kurangnya perhatian pimpinan terhadap permasalahan laporan keuangan</p>
	<p>Kenapa? 1. Karena adanya pola mutasi di satker dan DJPB. 2. Petugas yang minta dimutasi karena tidak menyukai atau tidak memahami pekerjaan</p>	<p>Kenapa? 1. Jumlah pegawai yang terbatas pada satker tersebut. 2. Tidak adanya pegawai yang mau ditempatkan pada bagian pelaporan keuangan, karena: a. Menganggap bukan sebagai pekerjaan teknis. b. Menganggap sebagai pekerjaan yang tidak menarik dan tidak ada uangnya.</p>	<p>Kenapa? 1. karena tidak paham akan fungsi laporan keuangan. 2. Karena menganggap sebagai pekerjaan yang tidak menarik dan tidak ada uangnya. 3. Karena tidak adanya 'tekanan' dari pimpinan tingkat atas.</p>

LKPP Tingkat kanwil X DJPB Serang dinilai masih belum memenuhi standar baik dari tingkat akurasi data maupun kualitas LKPP tersebut

Kenapa sistem aplikasi menjadi penyebab yang mempengaruhi tingkat akurasi dan kualitas LKPP yang disusun oleh Kanwil?




UNIVERSITAS
MERCUBUANA

<p>Upaya penyempurnaan aplikasi dan penyesuaian terhadap perubahan yang terjadi baik dari segi peraturan, prosedur maupun system akuntansi.</p>	<p>Karena system aplikasi yang sering berubah terutama pada aplikasi SAKPA, aplikasi SP2D, aplikasi Vera dan Aplikasi Aklap</p>	<p>Karena ketidakmampuan aplikasi untuk menyaring data yang 'error'</p>	<p>Karena belum terintegrasinya sistem aplikasi mulai dari proses perencanaan sampai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara.</p>
Kenapa?			
<p>Membuat bingung petugas SAI</p>	<p>1. Terbatasnya tenaga programmer di DJPB yang memiliki kemampuan IT yang tinggi. 2. Kurangnya pegawai di kanwil X DJPB Serang yang menguasai IT (Kanwil/KPPN) sehingga sangat tergantung dengan programmer dari pusat bila diketemukan permasalahan aplikasi.</p>	<p>1. Proses pengelolaan keuangan Negara baru berjalan empat tahun sehingga masih terus dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan system aplikasi. 2. Membutuhkan dana yang besar.</p>	<p>Kenapa?</p>
	<p>Kenapa? Tampilan aplikasi yang selalu berubah</p>	<p>Kenapa? Setiap kali muncul aplikasi baru, sering ditemui kendala di</p>	<p>Kenapa? Sistem aplikasi yang belum sempurna tapi sudah</p>

			harus dijalankan		
		lapangan terutama dalam penginputan dan proses pengiriman data	harus dijalankan		
		Kenapa? 1. Petugas yang tidak paham dalam menjalankan system aplikasi yang baru. 2. Kurangnya sosialisasi	Kenapa? Untuk kepentingan pelaporan keuangan pemerintah.		

LKPP Tingkat kanwil X DJPB Serang dinilai masih belum memenuhi standar baik dari tingkat akurasi data maupun kualitas LKPP tersebut

	
<p>Kenapa komputer dan prasana lainnya menjadi penyebab yang mempengaruhi tingkat akurasi dan kualitas LKPP yang disusun oleh Kanwil?</p>	
<p>Karena belum memadainya sarana dan prasarana yang menunjang dalam proses pelaporan keuangan di beberapa satker</p>	<p>Karena belum memadainya sarana dan prasarana yang menunjang dalam proses pelaporan keuangan di kanwil X DJPB Serang terutama di KPPN Tangerang</p>
<p>Kenapa?</p>	
<p>1. Dana yang terbatas 2. Kurangnya dukungan atau perhatian dari pimpinan</p>	<p>1. Dana yang terbatas</p>

LKPP Tingkat kanwil X DJPB Serang dinilai masih belum memenuhi standar baik dari tingkat akurasi data maupun kualitas LKPP tersebut

Kenapa faktor manajemen menjadi penyebab yang mempengaruhi tingkat akurasi dan kualitas LKPP yang disusun oleh Kanwil?



	<p>Karena prosedur kerja yang berjalan tidak sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan</p> <p>Kenapa?</p> <p>4. SDM yang terbatas. 5. SDM yang tidak memiliki kompetensi</p>
<p>Karena kurangnya koordinasi antara pembuat kebijakan/peraturan sehingga membuat bingung pelaksanaan di lapangan</p> <p>Kenapa?</p> <p>Karena ketidakpatuhan terhadap peraturan, sistem dan prosedur akuntansi</p> <p>Kenapa?</p> <p>1. Tidak memahami pekerjaan 2. Tidak peduli 3. Kurangnya dukungan dari pimpinan</p>	<p>Karena kurangnya koordinasi antara pembuat kebijakan/peraturan sehingga membuat bingung pelaksanaan di lapangan</p> <p>Kenapa?</p> <p>Karena ketidakpatuhan terhadap peraturan, sistem dan prosedur akuntansi</p>
<p>Karena sistem di pemerintahan yang terlalu banyak kepentingan atau terlalu birokratis</p> <p>Kenapa?</p>	<p>Karena sistem di pemerintahan yang terlalu banyak kepentingan atau terlalu birokratis</p>

LAMPIRAN IV

**DAFTAR MONITORING REKONSILIASI DATA DENGAN UAPPA-W
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2008**

1	5	Makamah Agung	Pengadilan Tinggi Banten	√	√
2	6	Kejaksaan Agung	Kejaksaan Tinggi	√	
3	13	Departemen Hukum dan HAM	Kanwil Hukum dan HAM Prop Banten	√	√
4	15	Departemen Keuangan	Kanwil X DJBPN Serang	√	√
5			Kanwil VII DJP Banten	√	√
6			Kanwil Bea & Cukai Banten	√	√
7			Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Serang	√	√
8			18	Departemen Pertanian	Balai Besar Karantina Hewan Soetta
9	20	Departemen Energi & Sumber Daya Mineral	Listrik Pedesaan	√	√
10	22	Departemen Perhubungan	Administrator Pelabuhan Banten	√	√
11	23	Departemen Pendidikan Nasional	Universitas Terbuka	√	√
12	24	Departemen Kesehatan	Rumah Sakit Kusta Sitanala	√	√
13	25	Departemen Agama	Kanwil Depag Prop Banten	√	
14	29	Departemen Kehutanan	Balai Taman Nasional Ujung Kulon	√	√
15	32	Departemen Kelautan & Perikanan	Bagian Administrasi Pelatihan Perikanan Lapangan (BAPPL-STP Serang)	√	√
16	33	Departemen Pekerjaan Umum	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV	√	√
17	54	Badan Pusat Statistik	BPS Propinsi Banten	√	√
18	56	Badan Pertanahan Nasional	BPN Propinsi Banten	√	√
19	60	Kepolisian Negara RI	POLDA Metro Jaya	√	
20			POLDA Banten	√	√
21	68	BKKBN	BKKBN Prop Banten	x	√
22	75	Badan Meteorologi dan Geofisika	Balai Besar Meteorologi dan Geofisika	√	√
23	76	Komisi Pemilihan Umum	KPU Prop Banten	√	√
24	12	Departemen Perumahan	Gabrah Pusat 112	x	x
25			Pemda Propinsi Banten (Dekonsentrasi)	√	√
26			Pemda Kabupaten Serang (TP)	x	x
27			Pemda Kabupaten Pandeglang (TP)	x	x
28			Pemda Kabupaten Lebak (TP)	x	x
29			Pemda Kabupaten Tangerang (TP)	x	x
30			Pemda Kota Tangerang (TP)	√	√
31			Pemda Kota Cilegon (TP)	x	√

LAMPIRAN V – ANALISA LKPP SEMESTER I TA 2008

I. LAPORAN ARUS KAS

Perkiraan	Serang (020)	Tangerang (127)	Rangkasbitung (161)	Gabungan	Versi AKLAP	Selisih
Saldob Altitas pada LKPP	12.641.041.386	189.795.188.510	1.880.987.533	221.186.524.189		
Saldob Akhir Kas pada LAK	12.641.041.386	189.795.188.510	1.880.987.533	221.186.524.189		
Saldob Awal Kas pada LAK	12.641.041.386	189.795.188.510	1.880.987.533	221.186.524.189		

LAMPIRAN V – ANALISA LKPP SEMESTER I TA 2008

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

No.	Perkiraan	Serang (020)	Tangerang (127)	Rangkasbitung (161)	Gabungan	Verisi AKLAP	Selfish
1	Realisasi Transfer ke Daerah Akun 61	58,256,784,691	219,119,382,920	13,026,115,841	290,402,283,452	290,402,283,452	
	Realisasi Belanja BA 70	58,256,784,691	219,119,382,920	13,026,115,841	290,402,283,452	290,402,283,452	0
2	Realisasi Subsidi & Transfer Akun 62	0	0	0	0	0	
	Realisasi Belanja Akun 71	0	0	0	0	0	0
3	Penerimaan Perpajakan Netto (41)	4,047,137,953,206	4,111,591,661,332	37,782,791,995	8,196,512,406,533	8,196,512,409,533	
	Penerimaan Pajak MAP	4,061,051,686,565	4,227,926,039,443	37,782,791,995	8,326,760,518,003	8,326,760,521,003	
	Pengembalian Pajak	13,913,733,359	116,334,378,111	0	130,248,111,470	130,248,111,470	
	LRA on the face	4,047,137,953,206	4,111,591,661,332	37,782,794,995	8,196,512,409,533	8,196,512,409,533	0
4	PNBP (netto)	22,011,842,996	204,965,802,430	779,286,418	227,756,931,844	227,756,931,844	
	PNBP	22,011,842,996	204,965,802,430	779,286,418	227,756,931,844	227,756,931,844	
	Pengembalian PNBP	0	0	0	0	0	
	LRA on the face	22,011,842,996	204,965,802,430	779,286,418	227,756,931,844	227,756,931,844	0
5	Penerimaan Hibah	0	0	0	0	0	
	LRA on the face	0	0	0	0	0	0
6	Belanja Pegawai (netto)	278,065,559,980	382,606,368,979	36,508,355,898	697,180,284,857	697,180,284,857	0
	Belanja Pegawai	279,794,093,155	382,987,853,644	36,527,161,765	699,309,108,564	699,309,108,564	
	Pengembalian Belanja	1,728,533,175	381,484,665	18,805,867	2,128,823,707	2,128,823,707	

LAMPIRAN V – ANALISA LKPP SEMESTER I TA 2008

	LRA on the face	278,065,559,980	382,606,368,979	36,508,355,898	697,180,284,857	697,180,284,857	
7	Belanja Barang (netto)	62,536,491,791	100,761,927,568	5,753,399,248	169,051,818,607	169,051,818,607	
	Belanja Barang	62,563,229,423	100,929,571,054	5,761,158,696	169,253,959,173	169,253,959,173	
	Pengembalian	26,737,632	167,643,486	7,759,448	202,140,566	202,140,566	
	LRA on the face	62,536,491,791	100,761,927,568	5,753,399,248	169,051,818,607	169,051,818,607	0
8	Belanja Modal (netto)	87,053,703,506	46,924,104,254	914,564,050	134,892,371,810	134,892,371,810	
	Belanja Modal	87,053,703,506	46,976,113,456	914,564,050	134,944,381,012	134,944,381,012	
	Pengembalian	0	52,009,202	0	52,009,202	52,009,202	
	LRA on the face	87,053,703,506	46,924,104,254	914,564,050	134,892,371,810	134,892,371,810	0
9	Belanja Pembayaran Kewajiban Utang	3,130,358,232	1,639,143,359	0	4,769,501,591	4,769,501,591	
	LRA on the face	3,130,358,232	1,639,143,359	0	4,769,501,591	4,769,501,591	0
	Belanja Subsidi	688,522,500	0	0	688,522,500	688,522,500	
	LRA on the face	655,522,500	0	0	655,522,500	688,522,500	0
10	Belanja Bantuan Sosial (netto)	288,729,192,955	1,039,500,000	20,714,186,000	310,482,878,955	310,482,878,955	
	Belanja Bantuan Sosial	288,781,183,500	1,039,500,000	20,714,186,000	310,534,869,500	310,534,869,500	
	Pengembalian	51,990,545	0	0	51,990,545	51,990,545	
	LRA on the face	288,729,192,955	1,039,500,000	20,714,186,000	310,482,878,955	310,482,878,955	0
11	Belanja Lain-lain (netto)	2,924,803,872	384,098,360	31,494,000	3,340,396,232	3,340,396,232	
	Belanja Lain-lain	2,924,803,872	384,098,360	31,494,000	3,340,396,232	3,340,396,232	
	Pengembalian	0	0	0	0	0	
	LRA on the face	2,924,803,872	384,098,360	31,494,000	3,340,396,232	3,340,396,232	0

LAMPIRAN V – ANALISA LKPP SEMESTER I TA 2008

	LRA on the face	2,924,803,872	384,098,360	31,494,000	3,340,396,232	3,340,396,232
12	Transfer Ke Daerah	58,256,784,691	219,119,382,920	13,026,115,841	290,402,283,452	290,402,283,452
	LRA on the face	58,256,784,691	219,119,382,920	13,026,115,841	290,402,283,452	290,402,283,452
						0

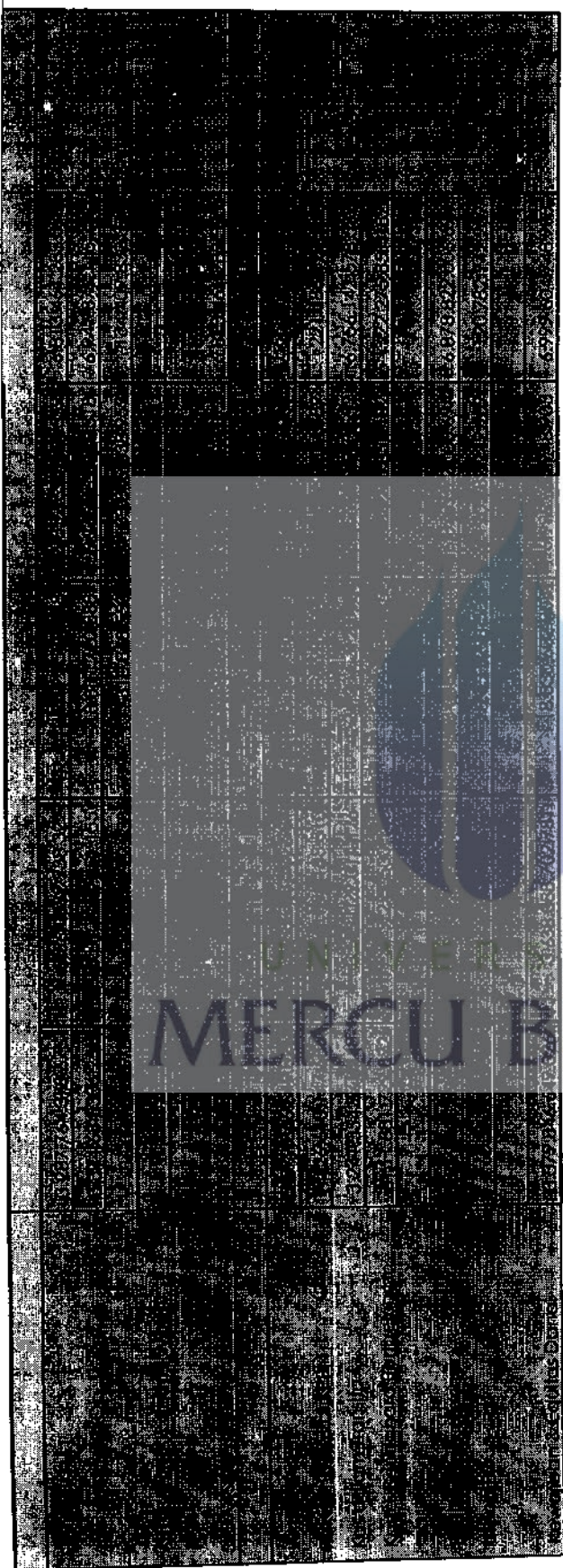


LAMPIRAN V – ANALISA LKPP SEMESTER I TA 2008

V. NERACA KUN

Perkiraan	Serang (020)	Tangerang (127)	Rangkasbitung (161)	Gabungan	Versi AKLAP	Selish
Utang	11.881.782	271.500.143	2.221.115	272.581.792	272.581.792	
Utang Piutang	50.258.000	1.116.880.000	120.600.000	1.206.811.057	1.206.811.057	
Permodalan	67.500.000	1.846.225.000	62.500.000	1.206.811.057	1.206.811.057	
Utang Piutang Neraca Saldo	69.280.000	1.491.386.225	163.100.000	1.206.811.057	1.206.811.057	
SAL	31.900.037.831	3.097.754.067.161	3.902.202.220	65.865.997.212	65.865.997.212	
Saldo Awal Kas	29.673.756.096	28.501.920.100	3.779.805.300	61.955.481.496	61.955.481.496	
UP TAYU	2.146.281.735	1.252.167.061	122.396.920	3.520.845.716	3.520.845.716	
Koreksi Pemindahbukuan TA 2007	107.129.212	7.884.375	0	114.513.587	114.513.587	
SAL pada Neraca KUN	31.712.908.819	29.746.307.786	3.902.202.220	65.361.413.625	65.361.413.625	
	31.900.037.831	29.764.097.161	3.902.202.220	65.476.327.212	65.476.327.212	

LAMPIRAN V – ANALISA LKPP SEMESTER I TA 2008



ITAS
MERCU BUANA

LAMPIRAN VI

KANTOR WILAYAH X DITJEN PBN SERANG
NERACA AKUNTANSI UMUM
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2008
(Dalam Rupiah)

ASET		
ASET LANCAR	C.2.4	22.275.851.182
Kas dan Bank		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.2.4.1	22.275.851.182
JUMLAH ASET LANCAR		22.275.851.182
JUMLAH ASET LANCAR		22.275.851.182
ASET TETAP	C.2.5	132.241.169.760
Tanah Sebelum Disesuaikan	C.2.5.1	8.189.521.300
Peralatan dan Mesin Sebelum Disesuaikan	C.2.5.2	41.672.188.348
Gedung dan Bangunan Sebelum Disesuaikan	C.2.5.3	8.201.006.912
Jalan, Irigasi dan Jaringan Sebelum Disesuaikan	C.2.5.4	74.178.453.200
JUMLAH ASET TETAP		132.241.169.760
JUMLAH ASET		154.517.020.942
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.2.6	19.090.906.560
Uang Muka dari KPPN	C.2.6.2	19.090.906.560
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		19.090.906.560
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	C.2.7	22.275.851.182
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan	C.2.7.1	0
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0
JUMLAH KEWAJIBAN		19.090.906.560
EKUITAS DANA		
EKUITAS DANA INVESTASI	C.2.8	132.241.169.760
Diinvestasikan dalam aset tetap	C.2.8.1	132.241.169.760
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI		132.241.169.760
JUMLAH EKUITAS DANA		132.241.169.760
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		151.332.076.320

LAMPIRAN VII

KANTOR WILAYAH X DITJEN PBN SERANG
 NERACA KAS UMUM NEGARA
 PER 30 JUNI 2008
 (Dalam Rupiah)

ASET		
ASET LANCAR	C.2.1	6.999.604.748.903
Kas dan Bank		
Rekening Kas di KPPN	C.2.1.1	221.186.324.189
Kas dalam Transito	C.2.1.2	6.756.142.573.532
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.2.1.3	22.275.851.182
Uang Muka dari Rekening BUN	C.2.1.4	0
JUMLAH ASET LANCAR		6.999.604.748.903
JUMLAH ASET		6.999.604.748.903
KEWAJIBAN	C.2.2	120.782.742.209
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	C.2.2.1	120.662.151.057
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.2.2.2	120.591.152
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		120.782.742.209
EKUITAS DANA LANCAR	C.2.3	
SAL	C.2.3.1	65.361.413.625
SIKPA	C.2.3.2	6.813.461.283.373
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek	C.2.3.3	(690.304)
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR		6.878.822.006.694
JUMLAH EKUITAS DANA		6.878.822.006.694
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		6.999.604.748.903

AKUNTANSI UMUM
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TINGKAT KLASA BUN KPPN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2008
(DALAM RUPIAH)

TANGGAL : 25-08-08
HAL : 1

KANWIL : 10 SERANG

	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6 - 8	10 = 9 - 4	11
A										
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH										
I. PENERIMAAN DALAM NEGERI										
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN										
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK										
II. PENERIMAAN HIBAH										
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH (A.I+II)										
B										
BELANJA NEGARA										
I. BELANJA NEGARA										
1. BELANJA PEGAWAI										
2. BELANJA BARANG										
3. BELANJA MODAL										
4. BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG										
5. BELANJA SUBSIDI										
6. BELANJA HIBAH										
7. BELANJA BANTUAN SOSIAL										
8. BELANJA LAIN-LAIN										
II. TRANSFER KE DAERAH										
1. TRANSFER DANA PERIMBANGAN										
2. TRANSFER DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYUSJATAN										
JUMLAH BELANJA NEGARA (B.I+II)										
C										
PEMBAYARAN										
I. PEMBAYARAN DALAM NEGERI										
1. PERBANKAN DALAM NEGERI										
2. NON PERBANKAN DALAM NEGERI										
II. PEMBAYARAN LUAR NEGERI										
1. PENARIKAN PINJAMAN LUAR NEGERI										
2. PEMBAYARAN CICILAN POKOK UTANG LUAR NEGERI										
JUMLAH PEMBAYARAN (C.I+C.II)										

LAMPIRAN IX

KANTOR WILAYAH X DITJEN PBN SERANG
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2008
(Dalam Rupiah)

Uraian		Catatan	Jumlah
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
I.	Arus Kas Masuk		
	Pendapatan Negara dan Hibah		
	1 Penerimaan Perpajakan	B.2.1	8.196.512.409.533
	2 Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.2.2	227.274.392.408
	a. Penerimaan Sumber Daya Alam	B.2.2.1	0
	b. Penerimaan PNBP Lainnya	B.2.2.2	227.274.392.408
	3 Pendapatan Hibah	B.2.3	0
	Jumlah Arus Kas Masuk (A.I)		8.423.786.801.941
II.	Arus Kas Keluar		
II.a	Belanja Pemerintah Pusat	B.2.4	1.185.513.402.742
	1 Belanja Pegawai	B.2.4.1	697.180.284.857
	2 Belanja Barang	B.2.4.2	169.051.818.607
	3 Belanja Denda	B.2.4.3	4.769.501.591
	4 Subsidi	B.2.4.4	688.522.500
	5 Hibah	B.2.4.5	0
	6 Bantuan Sosial	B.2.4.6	310.482.878.955
	7 Belanja Lain-lain	B.2.4.7	3.340.396.232
II.b	Belanja Daerah	B.2.5	290.402.283.452
	1 Dana Perimbangan	B.2.5.1	290.402.283.452
	2 Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	B.2.5.2	0
	Jumlah Arus Kas Keluar (A.II)		1.475.915.686.194
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (A.I - A.II)		6.947.871.115.747
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN			
I.	Arus Kas Masuk		
	Penjualan Aset Tetap	B.2.6	482.539.436
	a. Pendapatan Penjualan Aset Tetap		
	b. Pengembalian Pendapatan Penjualan Aset Tetap		
	Jumlah Arus Kas Masuk (B.I)		482.539.436
II.	Arus Kas Keluar		
	Belanja Modal	B.2.7	134.892.371.810
	a. Belanja Modal untuk Tanah		8.189.521.300
	b. Belanja Modal untuk Peralatan dan Mesin		39.146.854.628
	c. Belanja Modal untuk Gedung dan Bangunan		8.131.166.912
	d. Belanja Modal untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan		74.178.453.200
	e. Belanja Pemeliharaan yang dikapitalisasi		2.595.173.720
	e. Belanja Modal untuk Fisik Lainnya		2.651.202.050
	Jumlah Arus Kas Keluar (B.II)		134.892.371.810
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan (B.I - B.II)		(134.409.832.374)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN			

LAMPIRAN IX

I.	Arus Kas Masuk		
	Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri		
	Penarikan Pinjaman Proyek	B.2.8	0
	Jumlah Arus Kas Masuk (C.I)		0
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (C.I - C.II)		0
ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN			
I.	Arus Kas Masuk		
	1 Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	B.2.9	120.662.151.057
	3 Penerimaan Kiriman Uang	B.2.10	2.210.731.386.733
	4 Penerimaan Transito	B.2.11	18.654.308.364
	5 Koreksi Pengeluaran Pemindahbukuan	B.2.12	4.987.261
	Jumlah Arus Kas Masuk (D.I)		2.350.052.833.415
II.	Arus Kas Keluar		
	1 Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	B.2.13	-
	2 Pengeluaran Kiriman Uang	B.2.14	8.966.873.960.265
	3 Pengeluaran Transito	B.2.15	37.409.313.830
	Jumlah Arus Kas Keluar (D.II)		9.004.283.274.095
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran (D.I - D.II)		(6.654.230.440.680)
	KENAIKAN (PENURUNAN) KAS (A+B+C+D)		159.230.842.693
	SALDO AWAL KAS	B.3	61.955.481.496
	SALDO AKHIR KAS	B.4	221.186.324.189

PERINGKAT T LKPPKANWIL T A 2007

PERINGKAT	KODE	KANWIL	NILAI
1	XV	KANWIL SURABAYA	94.60
2	XXIII	KANWIL MAKASAR	94.42
3	XVII	KANWIL PALANGKARAYA	92.986
4	XXII	KANWIL KUPANG	92.985
5	XVI	KANWIL PONTIANAK	92.14
6	XII	KANWIL BANDUNG	91.89
7	V	KANWIL JAMBI	91.81
8	II	KANWIL MEDAN	91.20
9	XIII	KANWIL SEMARANG	91.02
10	XXI	KANWIL MATARAM	90.50
11	XXVI	KANWIL GORONTALO	90.14
12	XIX	KANWIL SAMARINDA	89.99
13	III	KANWIL PADANG	89.96
14	XXVIII	KANWIL TERNATE	89.78
15	X	KANWIL SERANG	89.36
16	XXVII	KANWIL MANADO	89.25
17	XVIII	KANWIL BANJARMASIN	89.21
18	VI	KANWIL PALEMBANG	89.12
19	XXV	KANWIL KENDARI	89.07
20	IV	KANWIL PEKANBARU	88.89
21	XIX	KANWIL PANGKALPINANG	88.43
22	XXIX	KANWIL AMBON	88.33
23	XXX	KANWIL JAYAPURA	88.24
24	VIII	KANWIL BENGKULU	87.95
25	I	KANWIL ACEH	86.68
26	XX	KANWIL DENPASAR	85.76
27	XXIV	KANWIL PALU	85.09
28	VII	KANWIL LAMPUNG	84.75
29	XIV	KANWIL YOGYAKARTA	81.66
30	XI	KANWIL JAKARTA	81.16

PERINGKAT LKPP KPPN T A 2007

Peringkat	Kode	Kamwil/KPPN	Kualitas LKPP		Ketepatan Waktu		Beban Kerja		Tk Partisipasi		Nilai Akhir
			80%	10%	10%	20%	10%	20%			
1	057	PARE - PARE	98.60	90.07	73.00	100.00	100.00	96.41			
2	035	BONDOWOSO	98.50	96.50	66.00	100.00	100.00	95.35			
3	180	MAJESA	100.00	88.32	64.00	100.00	100.00	95.23			
4	102	BANGKALAN BUKIT	98.50	100.00	60.00	100.00	100.00	95.18			
5	172	POSIDLO	98.50	88.32	64.00	99.20	99.20	95.05			
6	018	JAKARTA I	97.00	81.70	92.00	98.72	98.72	94.91			
7	128	SUKABUMI	98.50	87.93	88.00	100.00	100.00	94.79			
8	073	BOJONEGORO	98.50	100.00	56.00	100.00	100.00	94.70			
9	174	LARANTUKA	98.50	91.82	64.00	100.00	100.00	94.68			
10	088	MAJENE	98.50	94.55	60.00	100.00	100.00	94.555			
11	176	ACEH (KHUSBUS)	98.50	95.52	59.00	100.00	100.00	94.552			
12	040	ENDE	98.50	90.45	64.00	100.00	100.00	94.545			
13	048	MANADO	97.00	84.61	88.00	98.24	98.24	94.51			
14	041	WANGGAPU	98.50	89.08	64.00	100.00	100.00	94.409091			
15	172	ATAMBUA	98.50	89.08	64.00	100.00	100.00	94.409091			
16	068	PALOPOND	98.50	94.16	60.00	99.20	99.20	94.36			
17	066	WATAMPONE	98.50	91.05	60.00	100.00	100.00	94.20			
18	074	TAPAKTUAN	98.50	86.18	74.00	98.20	98.20	94.18			
19	044	SAMPIT	98.50	92.41	60.00	99.08	99.08	94.16			
20	081	AMBON	97.00	88.32	90.00	99.60	99.60	93.95			
21	088	MOJOKERTO	98.50	92.41	58.00	100.00	100.00	93.94			
22	100	BANYUWANGI	98.50	95.14	56.00	98.57	98.57	93.93			
23	070	LUBUK LINGGAU	98.50	98.84	56.00	96.80	96.80	93.92			
24	043	PALANGKARAYA	97.81	90.07	86.00	88.70	88.70	93.91			
25	054	KEDIRI	97.81	94.75	69.00	94.40	94.40	93.82			
26	181	RANGKASBITUNG	98.50	100.00	48.00	100.00	100.00	93.70			
27	177	BINJAI	98.50	95.52	60.00	100.00	100.00	93.65			
28	082	POSO	98.50	89.30	64.00	96.00	96.00	93.63			
29	103	BAU - BAU	97.00	90.07	64.00	100.00	100.00	93.61			
30	064	BANTARENG	98.50	94.55	50.00	100.00	100.00	93.55			
31	071	BIMA	97.81	94.55	60.00	97.60	97.60	93.54			
32	028	SEMARANG I	97.00	83.07	69.00	100.00	100.00	93.407			
33	033	MADIUN	95.50	83.88	79.00	99.20	99.20	93.406			
34	188	TUBAN	98.50	96.50	48.00	100.00	100.00	93.35			
35	080	BUNTOK	98.50	98.84	64.00	89.89	89.89	93.34			
36	072	PEKALONGAN	97.00	95.52	58.00	98.40	98.40	93.33			
37	122	TAKENGON	98.50	85.80	58.00	100.00	100.00	93.28			
38	027	PURWOREJO	97.00	94.55	58.00	100.00	100.00	93.255			
39	135	SURABAYA II	97.81	87.27	72.00	88.80	88.80	93.253			
40	042	PONTIANAK	97.00	84.82	88.00	89.80	89.80	93.20			
41	187	BANGGAI	98.50	95.52	64.00	90.40	90.40	93.13			
42	059	KUPANG	90.70	87.73	100.00	99.20	99.20	93.03			
43	115	MAGELANG	95.60	97.27	58.00	100.00	100.00	92.93			
44	181	MUKOMUKO	98.50	97.27	48.00	97.42	97.42	92.91			
45	058	MATARAM	92.22	89.09	88.00	100.00	100.00	92.84			
46	079	SINTANG	97.00	93.18	64.00	94.40	94.40	92.80			
47	097	PATI	98.50	85.52	59.00	91.20	91.20	92.792			
48	131	JEMBER	98.50	82.60	56.00	99.20	99.20	92.790			
49	020	BERANG	96.72	79.57	82.00	92.00	92.00	92.58			
50	180	SEKAYU	98.50	89.68	56.00	94.40	94.40	92.55			
51	045	BANJARMASIH	89.58	91.82	98.00	100.00	100.00	92.54			
52	134	SEMARANG II	85.51	69.68	72.00	95.20	95.20	92.514			
53	024	CIREBON	97.00	82.09	69.00	96.00	96.00	92.509			
54	012	JAMBI	95.22	84.23	79.00	95.20	95.20	92.49			
55	054	MAKASSARI	98.50	92.41	73.00	84.00	84.00	92.44			
56	032	MALANG	95.50	94.55	68.00	93.60	93.60	92.37			
57	086	GARUT	98.50	75.09	66.00	100.00	100.00	92.21			
58	022	BANDUNG I	93.72	80.93	79.00	99.20	99.20	92.06			
59	171	BEKASI	95.22	90.07	59.00	100.00	100.00	92.038			
60	013	SUNGAI PENUH	98.50	92.41	50.00	93.47	93.47	92.035			
61	117	PUTUSSIBAU	97.00	82.68	54.00	100.00	100.00	91.87			
62	028	SURAKARTA	97.61	90.07	59.00	91.65	91.65	91.80			
63	081	LUBUK SIKAPING	98.50	90.07	46.00	95.20	95.20	91.75			
64	083	SINGKAWANG	97.00	91.05	70.00	87.20	87.20	91.745			
65	002	LANGSA	97.81	65.77	68.00	100.00	100.00	91.743			